

## Strategi Inovasi Bumdes Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Mukhrizal Effendi<sup>1</sup>, Muhammad Taher Rambe<sup>2</sup>, Rini Antika Ritonga<sup>3</sup>, Riana Sitio<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Management Department, Universitas Islam Labuhan Batu

<sup>3,4</sup> Accounting Department, Universitas Islam Labuhan Batu

JL. HM. Yunus, No. 09, Rantau Prapat, Rantau Sel., Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21412, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>effendimukhrizal@gmail.com, <sup>2</sup>muhammad.taherrambe@gmail.com, <sup>3</sup>riniantika.08@gmail.com,  
<sup>4</sup>sitior49@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 04-10-2021

Direvisi: 14-02-2022

Disetujui: 23-02-2022

### Abstrak

Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengalokasikan dana Desa sejak tahun 2014 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Terdapat 57 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berstatus aktif sejak tahun 2018, namun berdasarkan jumlah tersebut posisi BUMDes rata-rata masih pada posisi *cluster* rintisan, dimana ditandai dengan sistem manajemen masih tradisional, SDM terbatas dan pemasaran yang belum memadai. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Permasalahan memilih dan menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes merupakan masalah yang harus dituntaskan. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mix methods*) antara kualitatif dan kuantitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Data di peroleh dari wawancara, observasi dan kuesioner. Analisis data deskriptif dengan menggabungkan analisis SWOT. Hasil menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut secara umum sudah cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam hal pemilihan jenis usaha yang kurang sesuai kebutuhan masyarakat, belum memiliki sumber daya yang memadai. Peran kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Direktur BUMDes sudah terjalin komunikasi yang baik. Keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat diperlukan untuk mensosialisasikan pendirian, rekrutmen pengelolaan BUMDes, penguatan kapasitas SDM dan pendampingan aktif BUMDes oleh SKPD terkait sebagai suatu rangkaian model.

Kata Kunci: Strategi, Inovasi, Kesejahteraan Ekonomi, BUMDes.

### Abstract

*North Labuhanbatu Regency has allocated Village funds since 2014 with the hope that development will be more evenly distributed to the village level. There are 57 Village-Owned Enterprises (BUMDes) with active status since 2018, but based on this number, the average position of BUMDes is still in the pilot cluster position, which is characterized by traditional management systems, limited human resources and inadequate marketing. So that rural people can develop their potential, so that they are not harmed and benefit more, a backflow is needed in the distribution of natural resources and policies. The problem of choosing and determining the type of business to be run by BUMDes is a problem that must be resolved. The research uses a mixed approach (mix methods) between qualitative and quantitative with case studies as a research strategy. Data obtained from interviews, observations and questionnaires. Descriptive data analysis by combining SWOT analysis. The results show that the BUMDes in Kualuh Selatan District, North Labuhanbatu Regency are generally quite good, although there are some things that still need to be addressed in terms of choosing the type of business that does not match the needs of the community, and does not yet have adequate resources. The role of the Village head and the Village Representative Body (BPD) and the Director of BUMDes has established good communication. The involvement of the Village Community Empowerment Service is very necessary to socialize the establishment, recruitment of BUMDes management, strengthening human resource capacity and active assistance of BUMDes by related SKPD as a series of models.*

*Keywords: Strategy, Innovation, Economic Welfare, BUMDes*



## 1. Pendahuluan

Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengalokasikan dana Desa sejak tahun 2014 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Adapun 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes), antara lain: Kecamatan NA IX-X, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Marbau, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong. BUMDes yang berdiri sejak tahun 2018 berjumlah 57 dan berstatus aktif. Berdasarkan jumlah tersebut posisi BUMDes rata-rata masih pada posisi cluster rintisan, dimana ditandai dengan sistem manajemen masih tradisional, SDM terbatas dan pemasaran yang belum memadai.

Desa Sukarame merupakan wilayah bagian Kecamatan Kualuh Selatan dapat dijadikan panutan bagi BUMDes lainnya yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, disebabkan BUMDes Sejahtera Berseri yang terletak di Desa Sukarame berada pada posisi cluster mandiri. Bertolak dari Desa Sukarame kajian kelayakan usaha (*feasibility study*) akan dilaksanakan di Kecamatan Kualuh Selatan, salah satu dari 8 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 11 Desa, 1 Kelurahan, 14 Lingkungan dan 116 Dusun. Jumlah desa yang telah memiliki BUMDes sebanyak 7 Desa. Adapun desa-desa yang memiliki BUMDes antara lain: 1) Desa Damuli Pekan, 2) Desa Damuli Kebun, 3) Desa Lobu Huala, 4) Desa Gunung Melayu, 5) Desa Sialang Taji, 6) Desa Bandar Lama dan 7) Desa Siamporik. Dari sekian Banyak BUMDes yang terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut pada posisi cluster rintisan, bentuk-bentuk unit usaha BUMDes di masing-masing desa berbeda satu dengan yang lainnya. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Permasalahan memilih dan menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) merupakan masalah yang harus dituntaskan (Dewi, 2014). Ketika BUMDes didirikan biasanya ada 2 (dua) kemungkinan dalam menjalankan usaha, yaitu 1) sudah memiliki jenis usaha pada saat pendiriannya, atau 2) belum memiliki usaha ketika BUMDes didirikan. Bagi BUMDes yang belum menentukan akan bergerak di bidang usaha tertentu pasti akan menjadi masalah.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan di tingkat desa, antara lain sebagai berikut: 1) kualitas Sumber Daya Manusia dan 2) persoalan keuangan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan bentuk kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Pendirian BUMDes dilandasi oleh (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah., n.d.) jo. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.), (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.) serta (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa., n.d.). Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 jo. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.

Menyikapi masa pandemi yang dialami secara global, maka diharapkan bagi para pemangku kepentingan dapat dengan cermat dalam pemilihan dan penentuan jenis usaha yang akan dijadikan unit bisnis BUMDes harus dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang matang (Hermina Bafa et al., 2021). Studi ini akan mengeksplorasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan BUMDes serta faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman BUMDes di wilayah administrasi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Puguh mengatakan bahwa BUMDes merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang didirikan melalui musyawarah desa berdasarkan Peraturan Desa (Budiono, 2015). Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (selanjutnya disebut dengan APBDes) (Lestari et al., 2019). Selain itu, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh potensi ekonomi, sehingga sumber daya yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan (Candra, 2021).

Menurut Porter mengatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu (Michael E Porter, 2008). Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Widiastuti et al., 2019) (Sofyani et al., 2019).

Menurut UU No. 18 tahun 2002 tentang inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya. Kegunaan teori strategi dan inovasi dalam penelitian ini berkaitan dengan respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menanggapi permasalahan BUMDes sehingga peneliti mengadopsi strategi perusahaan dan inovasi dalam mengelola BUMDes.

Menurut Freeman mengatakan bahwa dalam inovasi terdapat, *offensive innovation strategy, defensive, imitative, dependent, traditional* dan *opportunity strategy* (Freeman, 1978). Penggolongan ini berdasarkan pada kecepatan dan waktu masuk dari perusahaan menuju area teknologi yang baru. Rogers mengatakan bahwa penerapan inovasi untuk mengubah sebuah keadaan didasari oleh pikiran-pikiran sebagai berikut (Rogers. E.M., 1983):

1. Keuntungan relatif merupakan sebuah inovasi yang diadopsi apabila daya manfaatnya terlihat menguntungkan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Seperti nilai ekonomi, prestise sosial maupun keunggulan.
2. Kompatibel merupakan tingkat kecepatan mengadopsi sebuah inovasi karena sesuai atau dengan norma atau nilai-nilai yang dianut sebelumnya.
3. Kompleksitas merupakan tingkat kesukaran dalam memahami suatu inovasi oleh adopter, makin rumit sukar tersebar untuk diterima, makin sederhana dan mudah dipahami akan makin cepat diterima.
4. Uji coba merupakan bagian penting dalam pemungutan sebuah inovasi. Inovasi yang dapat diuji coba dalam skala lebih kecil untuk mengetahui proses, manfaat, hasil dan dampaknya akan mudah diterima, sebab keraguan akan dapat direduksi terutama kegagalan dan dampaknya akan dapat diprediksi sebelumnya, apabila jika sudah terlihat manfaatnya.
5. Dapat diamati merupakan manfaat sebuah inovasi yang dapat diamati hasilnya akan cepat diterima dibandingkan dengan sebuah inovasi yang sukar diamati.

Dengan demikian inovasi merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, serta sesuai dengan ide, fakta dan informasi yang telah ada.

Produk inovasi pada umumnya menunjukkan sifat-sifat yang baru, berkualitas dan menguntungkan.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mix methods*) dengan strategi *Sequential exploratory* dimana tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Kombinasi data bersifat menyambung (*connecting*) hasil penelitian tahap pertama (hasil penelitian kualitatif) dan tahap berikutnya (hasil penelitian kuantitatif). Pendekatan kualitatif digunakan pengamatan terhadap peran informan yang menjadi objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan informan dengan judul penelitian sehingga nantinya informasi yang didapatkan dari hasil wawancara relevan untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagai metode yang dianggap paling efektif untuk menggambarkan objek penelitian. Data di peroleh dari wawancara, observasi dan dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan menggabungkan analisis SWOT.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Analisis SWOT: Faktor Internal dan Eksternal

Kondisi faktor internal dan faktor eksternal serta perumusan strategi inovasi BUMDes se-Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa mendatang digunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun tabel matriks SWOT pada penelitian ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Distribusi Jawaban Responden Atas Kuesioner Faktor Internal dan Faktor Eksternal

No	Uraian Isu dan Permasalahan	Jumlah	Rating	Bobot	Skor
<b>Lingkungan Internal</b>					
<i>Kekuatan (strength)</i>					
1	Potensi SDA	84	4	0.2	0.9
2	Program pemerintah daerah	55	3	0.2	0.5
3	Tersedia ADD	76	4	0.2	0.8
4	Banyaknya kegiatan usaha	55	3	0.2	0.5
5	Sumber Daya Manusia	34	2	0.1	0.2
6		55	3	0.2	0.5
	<b>Jumlah (a)</b>	<b>359</b>			<b>3.4</b>
<i>Kelemahan (weakness)</i>					
1	Motivasi masyarakat desa kurang	60	3	0.3	1.0
2	Wawasan dan keterampilan memanfaatkan peluang usaha	37	2	0.3	0.6
3	Modal kurang	63	3	0.3	1.0

4	Tidak ada pengendalian operasi	21	1	0.3	0.3
<b>Jumlah (b)</b>		<b>181</b>			<b>3.0</b>
<b>Total (a) + (b)</b>		<b>540</b>			

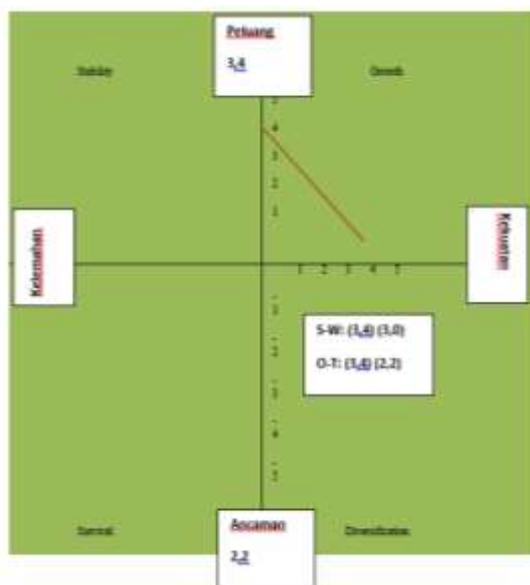
Sumber : Data primer diolah, 2020

Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden Atas Kuesioner Faktor Internal dan Faktor Eksternal

No	Uraian Isu dan Permasalahan	Jmlh	Rating	Bobot	Skor
<b>Lingkungan Internal</b>					
Peluang (opportunity)					
1	Payung hukum BUMDes	67	3	0.3	0.9
2	Pemanfaatan Teknologi	55	3	0.2	0.6
3	Tersedia SDM dan SDA	76	4	0.3	1.1
4	Banyak investor	55	3	0.2	0.6
5	Kemitraan	34	2	0.1	0.2
<b>Jumlah (c)</b>		<b>287</b>			<b>3.4</b>
Ancaman (threats)					
1	Perencanaan/program pemdes	39	2	0.3	0.5
2	Tidak ada respon dari masyarakat	39	2	0.3	0.5
3	Alih fungsi lahan	60	3	0.4	1.1
4	Unsur politik	21	1	0.1	0.1
<b>Jumlah (c)</b>		<b>159</b>			<b>2.2</b>
<b>Total (c) + (d)</b>		<b>446</b>			

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa hasil pengukuran kuesioner analisis IFAS yakni kekuatan (*strength*) memperoleh skor 3.4 dan kelemahan (*weakness*) skor 3.0. Sementara EFAS untuk peluang (*opportunity*) memperoleh skor 3.4 dan ancaman (*threat*) memperoleh skor 2.2.



Gambar 1. Matriks Kuadran SWOT

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan bahwa S-W dan O-T terletak pada kuadran 1. Kondisi ini

disarankan strategi yang paling cocok untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui program BUMDes adalah dengan strategi *growth*.

Saat ini upaya Pemerintah Desa perlu mengambil kebijakan untuk menentukan jenis usaha BUMDes terlebih dahulu sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga jika dikaitkan dengan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan maka diketahui bahwa strategi yang bersifat *growth* sangat cocok untuk diterapkan pada kondisi Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menganalisis potensi unggulan desa;
2. Melibatkan masyarakat desa dalam menentukan jenis usaha BUMDes;
3. Melakukan pembaharuan informasi seputar BUMDes;
4. Peningkatan teknologi yang tepat guna sesuai dengan potensi komoditi desa; dan
5. Melaksanakan dan mengikuti proses pelatihan, seperti: laporan keuangan dan tata kelola BUMDes.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IFAS dan EFAS, maka untuk membuat alternatif penggunaan dengan mengkombinasikan masing-masing aspek dengan membuat matriks analisis SWOT. Penggunaan matriks berkaitan dengan 2 poin yang saling berkaitan dengan berhubungan. Sehingga nantinya akan terformulasi alternatif yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi tantangan dalam meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Matriks SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Faktor Eksternal	
Peluang (O)	Strategi S – O	Strategi W – O
	1. Peluang usaha (0,0)	1. Kerjasama dengan kemitraan terkait modal, pemanfaatan teknologi, dan pendampingan pelaksanaan desa
Ancaman (T)	Strategi S – T	Strategi W – T
	2. Peningkatan ekonomi masyarakat (0,0)	2. Penyediaan sarpras 3. Pemanfaatan teknologi tepat guna. (-3,0)
		1. Pelaksanaan program

- |                           |                                  |   |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Kajian kelayakan usaha | 2. Pemanfaatan SDA dan SDM (1,1) | pengembangan usaha<br>Kejelasan regulasi (0,84) |
|---------------------------|----------------------------------|---|

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Strategi Inovasi BUMDes dalam rangka meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang dapat dikelompokkan atas 4 (empat) kelompok strategi, yaitu:

1. Strategi S-O meliputi, yaitu: peluang usaha yang dikembangkan harus didukung potensi desa yang ada atau mudah dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
2. Strategi W-O meliputi, yaitu: a) kerjasama dengan kemitraan terkait modal usaha, baik dengan lembaga keuangan dan lembaga non keuangan; b) pemanfaatan teknologi, jika dimungkinkan menggunakan pemasaran dengan aplikasi online; c) pendampingan, strategi ini dilakukan agar melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelola unit usaha BUMDes terkait teknis.
3. Strategi S-T, meliputi, yaitu: a) perlu dilakukan kajian kelayakan usaha terlebih dahulu; b) perlu dukungan dalam tata kelola BUMDes terutama memanfaatkan Sumber Daya Manusia, dengan melihat potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki, hal ini dilakukan agar dapat mengendalikan aktivitas unit usaha BUMDes yang berbeda.
4. Strategi W-T meliputi, yaitu: a) pelaksanaan program pengembangan usaha, kendala dalam menjalankan kegiatan program BUMDes belum ada sosialisasi tentang BUMDes hingga pelaksanaan teknis terkait kegiatan BUMDes sehingga masyarakat kurang antusias dan bahkan belum tahu tentang BUMDes; b) kejelasan regulasi, tuntutan hukum dari Peraturan Desa di tingkat daerah tentang pendirian BUMDes terlambat dibuat karena pemerintah daerah belum membentuk peraturan desa walaupun mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, belum secara rinci menjelaskan tentang pengelolaan BUMDes sehingga perkembangan dan pengelolaan BUMDes akan lambat.

**Strategi dan Inovasi Pengembangan Unit Usaha BUMDes di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Program pemulihan ekonomi nasional diharapkan bisa menjangkau pedesaan. BUMDes dianggap memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa yang terdampak pandemi covid-19. Namun, ada sejumlah kendala yang membuat perannya belum optimal, antara lain soal landasan hukum bagi keterlibatannya dalam program pemulihan (Kompas, 11 Agustus 2020).

Berdasarkan catatan pada seminar proposal yang diselenggarakan Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Utara bertempat di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Utara lantai 2. Hasil pemetaan BUMDes di wilayah Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020 berjumlah 6 BUMDes di masa pandemik yang telah terdata. Namun data itu masih bisa berkembang, karena pemetaan dilakukan berlangsung dinamis sebab Kecamatan Kualuh Selatan menargetkan pada tahun 2021, ada 11 (sebelas) BUMDes yang terbentuk di masing-masing desa.

Tabel 4. Data Perkembangan BUMDes di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Status
1	Damuli Kebun	Damuli Berkah	Simpan pinjam, ternak kambing	2019	Baru terbentuk
2	Gunung Melayu	Harapan Baru	Simpan Pinjam, Pupuk Bersubsidi	2018	Baru terbentuk
3	Damuli Pekan	Berseri dan Beriman	Kafe, Kredit Lembu dan Penggemukan Sapi	2018	Berkembang
4	Bandar Lama	Bandar Lama Sejahtera	Simpan Pinjam	2019	Baru terbentuk
5	Hasang	Karya Muda	Simpan Pinjam	2018	Baru terbentuk
6	Sialang Taji	Sialang Taji Mandiri	Toko desa	2018	Baru terbentuk

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4, maka dapat diklasifikasikan jenis usaha yang dikelola BUMDes ke dalam beberapa bentuk jenis usaha, yaitu:

- a. Jenis usaha sosial (*social business*)
- b. Jenis usaha penyewaan (*renting*) untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, meliputi: pasar.

- c. Jenis usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi: jasa pelayanan online (BRI Link).
- d. Jenis usaha perdagangan (*trading*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi: pemeliharaan ternak (penggemukan sapi)
- e. Jenis usaha keuangan (*financial business*), meliputi: simpan pinjam
- f. Jenis usaha bersama (*holding*).

Dari hasil yang telah diperoleh dapat dikatakan keberadaan BUMDes memiliki pengaruh meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat ekonomi desa. Hal itu dapat dilihat dari ekonomi desa yang semakin menguat, melalui jenis usaha BUMDes yang dikelola (Wulandari & Utami, 2020). Kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat desa, khususnya kelas ekonomi menengah ke bawah

membuktikan bahwa unit usaha simpan pinjam dirasakan oleh masyarakat desa sangat membantu dalam mencari modal usaha untuk memulai usaha dan tambahan modal usaha.

Namun, apabila dikaji menurut klasifikasi BUMDes versi Forum BUMDes Indonesia (FBI) dibandingkan dengan pemetaan status BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara bila dilihat dari tabel di atas, terjadi perbedaan status BUMDes antara BUMDes-BUMDes yang berada di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan versi Forum BUMDes Indonesia (FBI). Dengan demikian, usaha peneNamun, apabila berdasarkan klasifikasi versi Forum BUMDes Indonesia (FBI) peta jalan BUMDes yang ada di 6 (enam) Desa BUMDes yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Klasifikasi Bumdes Versi Forum BUMDes Indonesia

No	Klasifikasi	Omzet/tahun	Jumlah karyawan	Sumbangan PADES	Bantuan Sosial
1	Rintisan	0-360 jt	0-30	0-30 jt	0-3 jt
2	Tumbuh	361 jt-4,8 M	30-100	31-400 jt	3-40 jt
3	Matang	4,8 M-12 M	100-200	401 jt-1.2 M	40-120 jt
4	Maju	12 M-60 M	200-400	1.2-6 M	120-600 jt
5	Besar	>60 M	>400	>6 M	>600 jt

Sumber: Rudy Suryanto, 2018

Apabila dikaji menurut klasifikasi BUMDes versi Forum BUMDes Indonesia (FBI) dibandingkan dengan pemetaan status BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara bila dilihat dari tabel di atas, terjadi perbedaan status BUMDes antara BUMDes-BUMDes yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan versi Forum BUMDes Indonesia (FBI). Dengan demikian, usaha penerapan program Dana BUMDes yang dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan pengelolaan alokasi dana BUMDes yang dikelola oleh masyarakat desa. Penggunaan Dana BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah berjalan sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Akan tetapi, Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Dana BUMDes dirasakan mengalami kendala dari segi pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan belum ada aturan di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai pengambil kebijakan, adalah bagaimana menerapkan agar program BUMDes ini sebagai langkah strategis dalam usaha pengembangan wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 6. Desa Belum Memiliki Bumdes dan Potensi Jenis Usaha Di Lokasi Penelitian

No	Kecamatan	Desa	Potensi Jenis Usaha	Status
1	Kualuh Selatan	Lobu Huala	Simpan Pinjam, Penggemukan sapi dan wisata	Terakhir aktif tahun 2018
2	Kualuh Selatan	Siamporik	Simpan pinjam, pasar desa dan pusat kebugaran	Belum memiliki BUMDes

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki desa-desa di lokasi penelitian untuk segera membentuk dan mendirikan BUMDes dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun jenis usaha yang dominan adalah simpan pinjam, pembayaran rekening dengan menjadi mitra BRI Link dan inovasi, untuk Desa Lobu Huala potensi dan jenis usaha yang dapat dilakukan adalah penggemukan sapi, wisata. Sedangkan Desa Siamporik potensi dan jenis usaha

yang dapat dilakukan jenis usaha yang dapat ditumbuh kembangkan adalah simpan pinjam, pasar desa dan pusat kebugaran.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian BUMDes di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut secara umum sudah cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi yaitu Pengelolaan BUMDes yang baik, dapat dilihat setelah dievaluasi. Walaupun pendirian, kepengurusan dan pengelolaan BUMDes se-Kecamatan Kualuh Selatan rata-rata belum setahun, dalam pelaksanaan operasional BUMDes menimbulkan problematika baru, meliputi: a) pemilihan jenis usaha; b) tidak sesuai kebutuhan; dan c) tidak memiliki sumber daya yang memadai. Pada akhirnya, membuat BUMDes tidak berjalan maksimal dan berakhir mandek.

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan aktor penting untuk menggerakkan BUMDes, bersama-sama dengan Direktur BUMDes itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu melakukan sosialisasi pendirian, rekrutmen pengelolaan BUMDes, penguatan kapasitas SDM dan pendampingan aktif BUMDes oleh SKPD terkait sebagai suatu rangkaian model.

Memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, seperti yang dinyatakan dalam "Pendahuluan" akhirnya dapat mengakibatkan "Hasil dan Diskusi", sehingga ada kompatibilitas. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek penerapan studi lanjutan. Hindari Data Statistik dan Sampaikan pula rekomendasi untuk penelitian berikutnya berdasarkan sumber.

#### Referensi

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>
- Candra, F. U. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunggal Ulung Sebagai Sarana Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 2019–2024. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/396>
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, V(1), 1–14.
- Freeman. (1978). *Technology and Economic Performance: Lessons from Japan*; "Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change." (Stoneman P. (ed.)).
- Hermiina Bafa, Teguh Erawati, & Anita Primastiwi. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 445–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/inv.v3i2.6042>
- Lestari, P. A., Nugrahesthy, A., Hapsari, S., Kristen, U., & Wacana, S. (2019). Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa Sepakung Kabupaten Semarang. 4(2), 149–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2190>
- Michael E Porter. (2008). *Strategi Bersaing. Tangerang: Kharisma Pulishing Group* (Lyndon Saputra (ed.)). Karisma Publishing Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Rogers. E.M. (1983). *Diffusion of Innovations. Third Edition*. The Free Press.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Wulandari, N., & Utami, I. (2020). Eksplorasi Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa. *Jemap*, 3(1), 116–139. <https://doi.org/10.24167/jemap.v3i1.2483>